

Peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan

Rabu, 26 Juni 2024

Kerangka Paparan

1

Latar belakang

3

Temuan studi

2

Gambaran umum studi

4


Simpulan

Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Serukan Target NZE 2060 di COP28, Presiden Jokowi Ajak Berbagai Pihak Kolaborasi dan Investasi di RI

Sabtu, 02 Desember 2023 - 18:53:00 WIB

Share [G+](#) [WA](#) [f](#) [X](#)

 Tim iNews.id



Presiden Jokowi dalam acara World Climate Action Summit (WCAS) COP28 yang digelar di Expo City Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Jumat (1/12/2023). (Foto: BPMI Setpres)

responsibility of the party to the agreement. This includes elaborated chapters on transparency framework at the national level (National Registry System as the backbone of transparency framework), and means of implementation (finance, technology development and transfer, and capacity building).

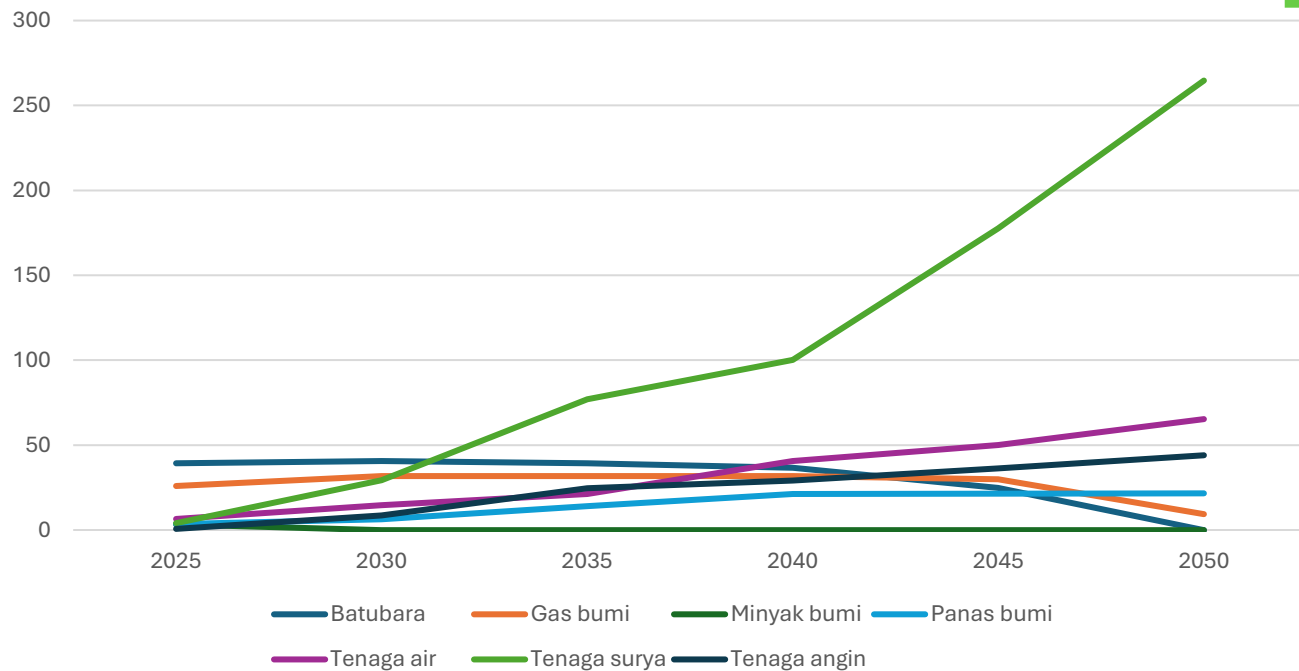
As mandated by Decision 1/CMA.3, Parties are requested to revisit and strengthen their NDC-2030 target, to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022. Responding to this mandate, Indonesia submits Enhanced NDC to the UNFCCC Secretariat by 23 September 2022 with increased emission reduction target from 29% in First NDC and Updated NDC to 31.89% unconditionally and from 41% in the Updated NDC to 43.20% conditionally. This Enhanced NDC is the transition towards Indonesia's Second NDC which will be aligned with the Long-Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050 with a vision to achieve net-zero emission by 2060 or sooner.

Sumber: ENDC Indonesia, 2022

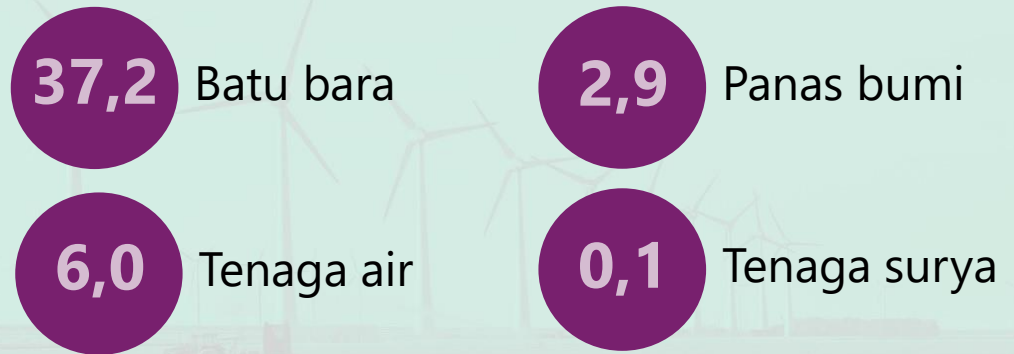
Sumber: iNews, 2023

Dalam proses transisi energi saat ini, pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan masih cukup rendah.

Kapasitas pembangkit berdasarkan sumber dalam skenario JETP (dalam GW)



Kapasitas terpasang PLN pada 2022 (dalam GW):



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Sumber: CIPP JETP, 2023 (diolah)

Peran pemerintah daerah menjadi kunci percepatan sekaligus penanganan dampak transisi energi.

Pensiun Dini PLTU Batu Bara akan Berimbas ke Daerah, Pemda Perlu Dilibatkan

Brand Content · Danang Nur Ihsan · Selasa, 18 Juli 2023 - 16:21 WIB



SOLOPOS.COM - Kompleks PLTU Palton di Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, Jawa Timur. (Antara/Dokumentasi PT Pembangkitan Jawa-Bali)

Solopos.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mempersiapkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Sumber: SoloPos Bisnis, 2023

Menteri ESDM Minta Peran Aktif Pemda Gencarkan Penurunan Emisi

Rencana aksi Pemda untuk pengembangan EBT merupakan usaha kemandirian energi

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah



Foto: AP/Jon Gambrell

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik gelaran GFoET untuk mendukung pencapaian target Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan transisi energi melalui peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber: Republika, 2022

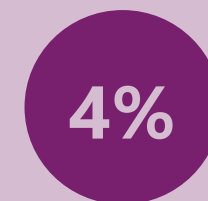
Contoh dampak: Risiko kehilangan pekerjaan di sektor batu bara

Pada 2020, terdapat 250.000 pekerja di usaha pertambangan batu bara.

Di beberapa provinsi penghasil batu bara, persentase pekerjaan tersebut lebih tinggi, yaitu:



Kalimantan Timur



Kalimantan Utara



Sumatera Selatan

Sumber: IESR, 2022



Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia?

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah **metode kualitatif**, yang meliputi:



Tinjauan literatur



Tinjauan kebijakan, termasuk Perda RUED dari 25 provinsi



50+ wawancara mendalam



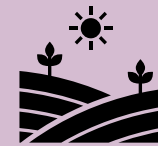
4 FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan



Observasi lapangan



Pengumpulan data dilakukan di tingkat nasional dan daerah. Pengumpulan data primer pada Januari - Maret 2024.



Provinsi **Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur**, dan **Papua Barat** dipilih berdasarkan variasi geografis dan inisiatif dalam transisi energi.

Temuan:

Beragam inisiatif untuk mendukung transisi energi di tingkat daerah telah digulirkan, namun intensitasnya masih belum merata.

JAWA BARAT

- Pergub - PLTS atap di kantor pemda dan sekolah
- Forum Energi Daerah
- Penunjukan manajer dan auditor energi untuk gedung pemerintahan
- Pengembangan konversi sampah menjadi tenaga listrik (*waste-to-energy*)

Nonpemerintah:

- Pengembangan pembangkit mikro hidro

BALI

- Pergub - Bali Energi Bersih
- Pergub - kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
- SK - pedoman penyelenggaraan bangunan hijau
- SE - pemanfaatan PLTS atap
- Program Nusa Penida 100% EBT Tahun 2030

Nonpemerintah:

- Bali-Kerthi Development Fund

NTT

- SE - konservasi energi di lingkungan instansi pemerintahan
- Distribusi alat konversi biogas
- Jurusan energi terbaru di SMK

Nonpemerintah:

- Pelatihan terkait PLTS di BLK
- Pengembangan usaha *woodchip* sebagai bahan *co-firing* PLTU
- Pendampingan menyusun Perdes

KALIMANTAN TIMUR

- Pergub - himbauan mengakselerasi EBT

Nonpemerintah:

- Kajian aspek GEDSI dalam rencana *coal phase-out*
- Sosialisasi dengan masyarakat dan anggota KADIN daerah

PAPUA BARAT

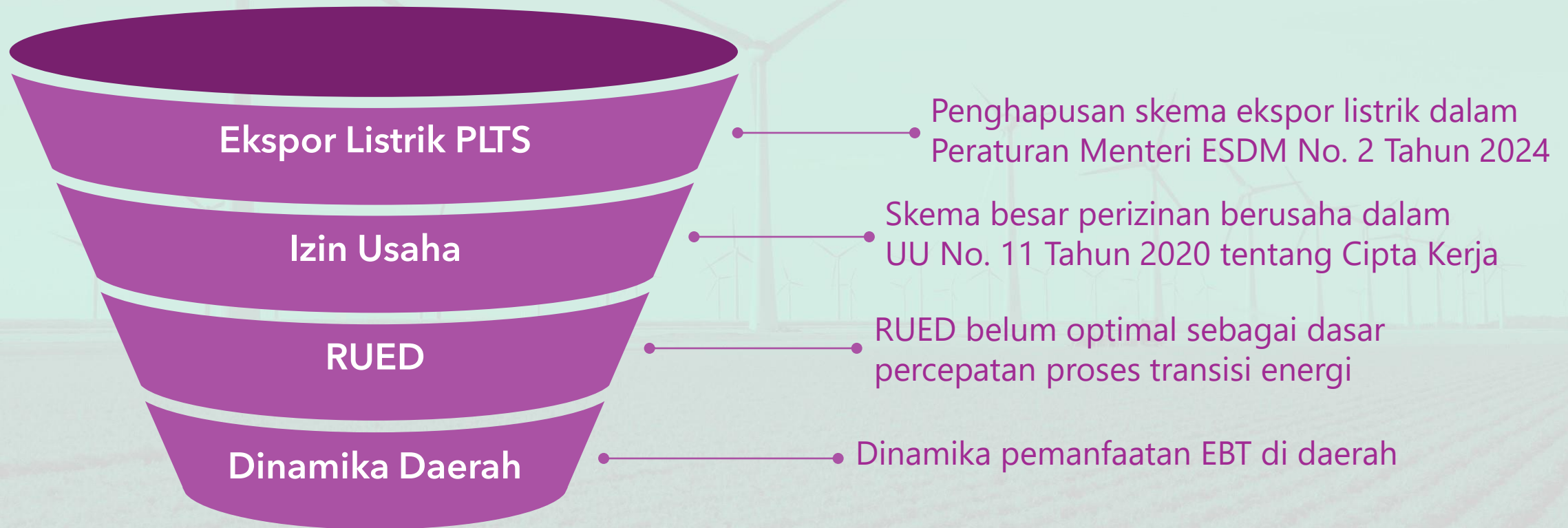
- Perdasus - pembangunan berkelanjutan di Papua Barat
- SK Gubernur - pembentukan tim *pengarusutamaan* PRK
- Mengembangkan PLTMh dan PLTS terpusat

Nonpemerintah:

- Sosialisasi pemetaan kebutuhan listrik untuk masyarakat

Temuan:

Kerangka regulasi yang ada belum bisa meningkatkan ruang lingkup partisipasi pemerintah daerah dalam transisi energi.



Temuan:

Kapasitas fiskal yang terbatas menghambat pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program transisi energi.



Penandaan (*tagging*) pada pendapatan transfer daerah mengikis alokasi untuk transisi energi



Pembiayaan pembangunan daerah masih berorientasi pada infrastruktur fisik



Dari alokasi APBD itu, yang terkait EBT, kira-kira persentasenya nggak sampai 1%. Kalau orang-orang bilang transisi energi penting. Tapi ketika masuk ke konteks daerah, dibandingkan urusan-urusan lain masih kalah terus kita.

(Pemerintah daerah A, 12 Maret 2024)

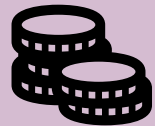
Temuan:

Peran dan kontribusi pemangku kepentingan lain diperlukan dalam transisi energi di daerah.



KAJIAN

- BRIDA
- Universitas
- Think tank



PEMBIAYAAN

- BUMD dan/atau perusahaan daerah
- BUMDes
- Bank dan koperasi
- CSR
- Lembaga internasional



KETENAGA-KERJAAN

- Balai Latihan Kerja
- Asosiasi pekerja/buruh
- SMK jurusan EBT



PENGEMBANGAN USAHA

- KADIN Daerah
- Pengusaha bidang EBTKE
- Asosiasi usaha



PELIBATAN MASYARAKAT

- NGO pendamping
- Tokoh agama, adat, dan masyarakat

Simpulan

1

Kurangnya harmonisasi tata kelola energi pusat-daerah menghambat pemerintah daerah dalam menjalankan mandat

2

Pemerintah daerah memerlukan kelonggaran untuk membiayai urusan-urusan yang belum menjadi prioritas bagi pemerintah pusat

3

Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan

A large field of wind turbines under a blue sky. The turbines are arranged in rows, and the foreground shows a field of crops. The text "Terima kasih" is overlaid on the left side of the image.

Terima kasih